

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transformasi perekonomian suatu wilayah menjadi upaya strategis yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah sebagai peningkatan taraf hidup dan kemakmuran masyarakat. Keberhasilan proses pengembangan dapat diukur dari tingkat kemakmuran penduduk, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berfungsi sebagai indikator fundamental dalam menilai kondisi perekonomian suatu negara karena menunjukkan intensitas aktivitas produksi dan konsumsi di dalamnya. Ketika pertumbuhan ekonomi berjalan optimal, maka akan terjadi peningkatan output, pembukaan peluang kerja baru, dan peningkatan penghasilan serta konsumsi masyarakat. Di sisi lain, upaya pengembangan perekonomian juga dihadapkan pada beragam masalah, salah satunya kemiskinan.

Kemiskinan masih menjadi persoalan struktural hingga saat ini yang belum terselesaikan sepenuhnya. Zakaria (2018:26) membagi kemiskinan menjadi 3 bagian utama, yaitu: (1) kemiskinan relatif, yaitu situasi di mana individu melampaui batas kemiskinan akan tetapi berada di bawah tingkat kesejahteraan penduduk sekitar; (2) kemiskinan kultural, yang terjadi akibat sikap atau budaya masyarakat yang tidak berupaya memperbaiki taraf hidupnya meskipun telah mendapatkan bantuan dari pihak lain; serta (3) kemiskinan absolut, yaitu kondisi individu belum mampu pada pemenuhan dasar hidupnya. Kemiskinan absolut terlihat kondisi paling berat karena mencerminkan keterbatasan kemampuan

individu pada pemenuhan keperluan pokok untuk hidup layak sesuai martabat kemanusiaan.

Jawa Timur, yaitu provinsi terluas di Pulau Jawa dan di posisi kedua berpenduduk terbanyak se-Indonesia, menghadapi beragam masalah sosial yang cukup serius, contohnya kemiskinan. Isu kemiskinan merupakan prioritas pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan kemakmuran masyarakat. Namun, tren jangka panjang menunjukkan penurunan persentase penduduk miskin secara bertahap setiap tahun, meskipun pada tahun 2023 sempat terjadi kenaikan (BPS Jawa Timur, 2023). Menurut BPS, pada tahun 2019 angka kemiskinan di Jawa Timur tercatat 4.112.250 jiwa, lalu di tahun 2020 meningkat menjadi 4.419.100 jiwa dan terus naik menjadi 4.572.730 jiwa pada tahun 2021. Kondisi ini membuktikan turunnya kemiskinan belum stabil maksimal disebabkan faktor sosial ekonomi di Jawa Timur. Oleh sebab itu, analisis naiknya kemiskinan tidak hanya penting dilakukan berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu, tetapi juga perlu dibandingkan antarprovinsi di Pulau Jawa sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut.

Gambar 1.1 Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Periode 2015-2024



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan grafik di atas, Provinsi Jawa Timur mengindikasikan tingginya tingkat kemiskinan dibandingkan provinsi lain selama periode 2015-2024. Tingkat kemiskinan tahun 2015 tercatat 12,34% dan mengalami penurunan secara bertahap hingga 10,37% tahun 2019. Namun, tahun 2020 dan 2021 tingkat kemiskinan naik yaitu sebesar 11,09% pada tahun 2020 dan meningkat kembali menjadi 11,40% pada tahun 2021. Kenaikan tersebut terjadi seiring dengan terjadinya pandemi yang berdampak signifikan terhadap kondisi perekonomian daerah. Junaidi dan Chan (2021) menyatakan bahwa pandemi menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat serta peningkatan pengangguran akibat terbatasnya aktivitas ekonomi, khususnya di sektor informal yaitu perdagangan kecil, usaha mikro dan kecil, jasa perorangan, sektor pertanian, serta pekerjaan harian lepas. Temuan tersebut memperkuat pada periode 2020-2021 terdapat kenaikan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur merupakan dampak langsung dari guncangan ekonomi akibat pandemi, bukan sekadar fluktuasi sementara.

Perbedaan antara Provinsi Jawa Timur dan provinsi lain terletak pada konsistensi Provinsi Jawa Timur yang berada di atas Jawa Barat, Banten, dan Jakarta. DKI Jakarta menempati posisi dengan tingkat kemiskinan terendah karena didukung oleh dominasi sektor jasa dan industri modern dengan tingkat pendapatan relatif lebih tinggi. Selain itu, Banten dan Jawa Barat menunjukkan tingkat kemiskinan yang lebih rendah meskipun jumlah penduduknya besar dibandingkan Provinsi Jawa Timur.

Setelah periode pandemi, angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur kembali menurun hingga mencapai 9,79 persen di tahun 2024. Angka ini tetap menjadikan di Pulau Jawa, kemiskinan Provinsi Jawa Timur relatif tinggi, yaitu berada pada

posisi kedua tertinggi setelah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kondisi ini membuktikan bahwa penurunan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur belum sepenuhnya sejalan capaian pertumbuhan ekonomi dan mencerminkan belum tercapainya pertumbuhan ekonomi yang adil bagi seluruh masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan TPT merupakan faktor fundamental yang dihadapi oleh setiap negara dalam upaya mengatasi persoalan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, pembangunan nasional seharusnya berorientasi pada naiknya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus berperan dalam penurunan angka kemiskinan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat agar kesejahteraan dapat meningkat dan jumlah penduduk miskin dapat berkurang. Saat mengukur keberhasilan pembangunan, jumlah penduduk miskin suatu negara sering digunakan sebagai indikator utama karena mencerminkan sejauh mana seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan hasil pembangunan.

Secara teoritis, penekanan kemiskinan dilakukan dalam tingginya pertumbuhan ekonomi karena peningkatan aktivitas ekonomi akan membuka peluang kerja serta peningkatan penghasilan penduduk. Namun demikian, tingginya laju pertumbuhan ekonomi tidak selalu diiringi oleh penurunan kemiskinan. Fenomena ini menandakan jika pertumbuhan ekonomi tidak terlalu inklusif atau dapat mendistribusikan jangkauan manfaatnya untuk seluruh lapisan masyarakat secara merata

Fenomena tersebut juga dapat terjadi apabila manfaat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah akibat

terkonsentrasi pada sektor atau wilayah tertentu. Selain itu, tingginya tingkat pengangguran serta ketimpangan distribusi pendapatan dapat menghambat proses penurunan kemiskinan meskipun terjadi tumbuhnya pertumbuhan ekonomi. Hal ini membuktikan perlu analisis mendalam untuk beragam faktor yang memengaruhi hubungan antara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, TPT, dan kemiskinan.

Faktor-faktor yang mendukung ketenteraman sosial serta keberhasilan pembangunan daerah turut mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai kontribusi penting yang berdaya saing dan berdampak terhadap pengurangan kemiskinan. Sebagai indikator utama, pertumbuhan ekonomi menunjukkan sehat atau tidaknya perekonomian suatu wilayah, sekaligus menjadi prasyarat bagi tercapainya kemajuan dan kemakmuran masyarakat. Sebaliknya, apabila suatu daerah tidak mampu meningkatkan pertumbuhannya, maka akan muncul berbagai permasalahan sosial dan ekonomi baru, salah satunya adalah meningkatnya angka kemiskinan.

The Wealth of Nations menurut Adam Smith (1776), pembagian kerja merupakan komponen penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui spesialisasi, efisiensi kerja meningkat, biaya produksi menurun, dan output nasional bertambah. Peningkatan produktivitas inilah yang menjadi fondasi bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lebih lanjut, Smith menegaskan pertumbuhan ekonomi sejati tidak dapat dipisahkan dari upaya penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi bukan hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan nasional, melainkan juga pemerataan manfaat pembangunan agar kesejahteraan seluruh

lapisan masyarakat dapat menikmati. Oleh sebab itu, semakin meningkat pertumbuhan ekonomi, semakin membesar potensi penurunan kemiskinan. Hubungan ini mengindikasikan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi menjadi strategi utama dalam menekan kemiskinan.

Ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia terjadi di hampir semua wilayah dengan tingkat yang bervariasi, yaitu tinggi, sedang, maupun rendah. Provinsi Jawa Timur termasuk salah satu wilayah tersebut. Dengan kontribusi terhadap PDRB nasional sebesar 15%, mencerminkan kemajuan pembangunan ekonomi dan menjadi pusat perekonomian di Pulau Jawa.

Selama periode 2015–2024, Provinsi Jawa Timur menunjukkan laju fluktuasi pertumbuhan ekonomi yang mencerminkan dinamika ekonomi yang kompleks. Dalam konteks yang disebutkan, pandemi menjadi akibat dari perlambatan ekonomi pada tahun 2020 yang berperan sebagai faktor signifikan dari fluktuasi tersebut.

Pada tahun 2017-2019, pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,46%-5,53% pada tahun 2019 yang relatif stabil. Namun di tahun 2020, menunjukkan perlambatan ekonomi yang signifikan akibat dampak dari pandemi, dengan nilai pertumbuhan ekonomi terendah yang bahkan mencapai angka minus sebesar -2,33%. Dampak pandemi pada tahun 2020 menyebabkan rendahnya pertumbuhan ekonomi serta menurunnya peranan sektor perekonomian.

Setelah mengalami kontraksi tajam pada tahun 2020, ekonomi bertahap pulih di tahun 2021 sebesar 3,56%. Pemulihan ini semakin menguat pada tahun 2022 dengan pertumbuhan mencapai 5,34%, mendekati angka sebelum pandemi. Hal ini

menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi mulai kembali normal, didorong oleh berbagai kebijakan pemulihan ekonomi serta peningkatan kembali konsumsi dan investasi pada daerah tersebut. Dengan melihat pola pertumbuhan ini, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Jawa Timur menunjukkan ketahanan dalam menghadapi krisis dan memiliki prospek pemulihan yang baik setelah menghadapi tantangan besar akibat dari Pandemi COVID-19.

Berdasarkan data BPS, di tahun 2015-2024 gini rasio di Provinsi Jawa Timur cenderung berfluktuasi, di mana pada tahun 2015–2020 terjadi penurunan hingga mencapai 0,366. Namun, penurunan tersebut belum mengindikasikan ketimpangan pendapatan telah mengalami perbaikan secara konsisten. Hal ini disebabkan karena pada tahun-tahun berikutnya nilai Gini Rasio kembali mengalami peningkatan meskipun perubahan yang terjadi tidak terlalu signifikan, nilai tersebut kembali menurun pada tahun 2022.

Aglomerasi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya ketimpangan pendapatan antarwilayah. Pada tingkat yang paling mendasar, aglomerasi ekonomi dapat dipahami sebagai pemusatan atau pengelompokan aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah geografis. Aglomerasi terjadi ketika aktivitas ekonomi, khususnya sektor industri dan kegiatan produktif lainnya, terkonsentrasi pada wilayah tertentu. Kondisi ini memberikan berbagai keuntungan, seperti efisiensi biaya produksi, peningkatan produktivitas, serta terbentuknya jaringan ekonomi yang lebih kuat (Nainggolan, 2020). Selain itu, peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat yang didorong oleh aglomerasi turut mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Namun, manfaat aglomerasi cenderung terpusat pada wilayah yang menjadi pusat kegiatan ekonomi. Daerah dengan tingkat aglomerasi rendah mengalami keterbatasan dalam pengembangan ekonomi, sehingga tertinggal dibandingkan wilayah maju. Situasi ini mengindikasikan bahwa aglomerasi tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi berpotensi memperbesar kesenjangan antarwilayah.

Sjafrizal (2018) menjelaskan bahwa dinamika disparitas pembangunan antar daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah perbedaan terfokusnya kegiatan ekonomi, mobilitas barang melalui perdagangan serta perpindahan faktor produksi antar wilayah, dan alokasi investasi yang berasal dari pemerintah maupun sektor swasta. Selain faktor-faktor tersebut, kebijakan pembangunan yang diterapkan oleh masing-masing daerah juga turut berperan dalam menentukan tingkat ketimpangan pembangunan di wilayah terkait.

Dampak dari aglomerasi tersebut kemudian mendorong terjadinya konsentrasi aktivitas ekonomi pada wilayah tertentu, seperti kawasan industri atau pusat pertumbuhan yang unggul dalam hal investasi, infrastruktur, dan SDM (Hendarmin, 2020). Hal ini menyebabkan faktor produksi, seperti modal, teknologi, dan tenaga kerja, lebih banyak mengalir ke wilayah maju. Fenomena ini dikenal sebagai efek backwash atau polarisasi, yang berdampak pada terhambatnya perkembangan wilayah tertinggal.

Konsentrasi ekonomi tersebut pada akhirnya menimbulkan ketimpangan pendapatan antarwilayah. Wilayah dengan tingginya aktivitas ekonomi cenderung mencerminkan tingkat pendapatan yang tinggi dibandingkan daerah dengan

rendahnya aktivitas ekonomi, sehingga kesenjangan kesejahteraan semakin melebar. Selain faktor aglomerasi yang telah dijelaskan, ketimpangan pendapatan antarwilayah juga dipengaruhi oleh adanya pergeseran struktur sektor ekonomi. Pergeseran ini menyebabkan aktivitas ekonomi semakin terpusat pada sektor-sektor tertentu di wilayah tertentu, sehingga memperkuat perbedaan tingkat pendapatan dan kesejahteraan antarwilayah.

Kondisi ini terlihat pada adanya perubahan atau pergeseran sektor ekonomi pada tahun-tahun terakhir, namun kinerja perekonomian yang tinggi hanya terjadi di wilayah-wilayah dengan industri maju di Provinsi Jawa Timur seperti di Keresidenan Surabaya, Malang, dan Mojokerto yang bertolak belakang dengan wilayah pesisir seperti Ngawi, Pacitan dan wilayah lainnya yang masih mengandalkan ekonomi tradisional seperti sektor pertanian yang belum dikelola dengan maksimal. Sehingga peran sektor jasa dan industri terhadap perekonomian daerah berpotensi cenderung menaik, sementara sebagian wilayah masih bergantung pada produktivitas yang cenderung lebih rendah yaitu sektor pertanian. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan tingkat pendapatan antar sektor maupun antarwilayah, yang pada akhirnya dapat memengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan serta kondisi kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

Disparitas pendapatan pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor selain yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti potensi SDA dan kualitas SDM. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat beragam aspek yang memengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan, baik yang bersifat struktural maupun makroekonomi. Faktor makroekonomi yang berperan penting dalam memperburuk maupun mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan adalah tingkat pengangguran.

Pengangguran muncul ketika sebagian masyarakat tidak memiliki kesempatan kerja atau masih berada dalam tahap pencarian pekerjaan. Terjadinya kondisi ketidaksamaan peluang kerja dengan calon pekerja. Dengan demikian, ketimpangan pendapatan dapat diperparah oleh meningkatnya angka pengangguran, karena persebaran pendapatan menjadi timpang akibat berkurangnya akses masyarakat terhadap sumber penghasilan.

TPT Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2024 memberikan pola yang tidak stabil. Tahun 2015 hingga 2019, TPT cenderung mengalami penurunan secara bertahap, dari 4,47% menjadi 3,82% pada tahun 2015-2019. Kondisi ini menandakan terdapat perbaikan dalam absorpsi SDM serta relatif stabilnya aktivitas ekonomi di Provinsi Jawa Timur sebelum terjadinya gangguan eksternal yang signifikan.

TPT meningkat cukup tajam pada tahun 2020 hingga mencapai 5,84%, yang merupakan angka tertinggi selama periode pengamatan. Lonjakan ini tidak terlepas pandemi yang menyebabkan ekonomi melambat dan membatasi aktivitas usaha, serta terjadinya pengurangan tenaga kerja di berbagai sektor. Kondisi tersebut mencerminkan semakin terbatasnya pemenuhan kebutuhan lapangan kerja bagi penduduk usia kerja yang memadai.

Selanjutnya, TPT pada 2021-2024 menunjukkan tren penurunan kembali, meskipun masih tergolong tingkat yang relatif lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi. Penurunan dari 5,74% menjadi 4,19% pada tahun 2021-2024 mengindikasikan adanya pemulihan ekonomi secara bertahap serta meningkatnya peluang kerja di Provinsi Jawa Timur. Meskipun demikian, angka tersebut

menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja belum sepenuhnya kembali ke kondisi pra-pandemi.

Tingkat pengangguran yang tinggi, khususnya pada tahun 2020, berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan tingkat kemiskinan. Peningkatan pengangguran dapat menyebabkan penurunan pendapatan rumah tangga, menurunnya daya beli masyarakat, serta meningkatnya kerentanan sosial-ekonomi. Pemberian pekerjaan serta penghasilan kepada masyarakat di suatu daerah termasuk salah satu strategi efektif untuk menekan kemiskinan, di mana penghasilan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Penurunan tingkat kemiskinan dapat terjadi apabila jumlah pekerja meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang tumbuh baik menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, output dan jasa dipengaruhi oleh daya beli masyarakat, terjadinya aktivitas produksi dan distribusi, serta tingkat teknologi yang semakin canggih.

Penelitian Nur Mila Dianti et al. (2024) serta Ghazy dan Wiwin (2023), menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Sebaliknya, Rekha Alfionika et al. (2021) serta Fanny dan Emi (2022) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi atau PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu secara otomatis menurunkan tingkat kemiskinan dan sangat bergantung pada karakteristik wilayah serta kualitas distribusi hasil pembangunan.

Penelitian oleh Nur Mila Dianti et al. (2024), menegaskan ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Sementara itu, penelitian Yulia Adella Sari (2021), Fanny dan Emi (2022), serta Feliks Arfid Guampe et al. (2022) menegaskan bahwa TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Namun, Rekha Alfionika et al. (2021) menunjukkan bahwa TPT tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa dampak pengangguran terhadap kemiskinan tidak selalu bersifat langsung dan dapat dipengaruhi oleh kondisi pasar tenaga kerja serta struktur ekonomi daerah.

Perbedaan temuan penelitian di atas menunjukkan bahwa hubungan antara tiap variabel bebas terhadap tingkat kemiskinan masih belum konsisten dan menunjukkan variasi hasil antar wilayahnya. Kondisi tersebut mencerminkan terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang memerlukan kajian lebih lanjut, khususnya pada Provinsi Jawa Timur yang memiliki karakteristik struktur ekonomi dan pasar tenaga kerja yang berbeda dibandingkan daerah lainnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang, dirumuskan permasalahan:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?

2. Apakah ketimpangan pendapatan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian, yaitu:

1. Untuk menganalisis apakah ada pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk menganalisis apakah ada pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk menganalisis apakah ada pengaruh tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup batas masalah yang diteliti, diantaranya:

1. Penelitian mencakup data selama 10 tahun, yaitu 2015-2024 di Provinsi Jawa Timur yang didapat melalui BPS Jawa Timur.
2. Menggunakan variabel Tingkat Kemiskinan diukur dengan Persentase sebagai Variabel Dependen, serta Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai Variabel Independen.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk semua pihak, diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Memberikan manfaat dan kontribusi yang berguna untuk pengembangan penelitian khususnya permasalahan mengenai pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian dapat sebagai masukan oleh pemerintah pusat serta daerah dalam merumuskan serta mengevaluasi kebijakan Pembangunan, khususnya pengentasan kemiskinan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Harapan pada penelitian ini dapat bermanfaat untuk sumber referensi dan informasi bagi peneliti lain yang mengangkat tema, variabel, serta alat analisis serupa.